

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**IMPLEMENTASI SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN UMKM
PERUSAHAAN DAGANG SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI ENTITAS
EMKM**

TIM PELAKSANA :

Oleh:

Dr. Endah Sri Wahyuni, CA, SE.Ak, MSi, CRMP, CPMA

090073

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
MARET – AGUSTUS 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Implementasi Sistem dan Pelaporan Keuangan UMKM Perusahaan Dagang Sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas EMKM

Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Dr. Endah Sri Wahyuni, SE.Ak, MSi, CA, CRMP, CPMA
- b. NIP/NIDN : 090073/0312086901
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Akuntansi
- e. No HP : 08129329593, 0817712869
- f. Alamat email : endah.swahyuni@budiluhur.ac.id
- a. Sumber dana Mandiri : Rp. **2,090,000**
(Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- b. DIKTI : -

Jakarta, Maret 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Arief Wibowo, S.Kom, M.Kom
NIP 020004

Dosen Pelaksana

Endah Sri Wahyuni
NIP 090073

Menyetujui,
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Krisna Adiyarta M.
NIP 890001

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	3
Bab II. Pelaksanaan	6
Bab III. OutPut	7
Daftar Pustaka	
Lampiran 1 Rincian Penggunaan Biaya	
Lampiran 2 Chart of Account	
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pemerintah melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha menetapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300juta
2. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50juta sampai dengan Rp500juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300juta sampai dengan Rp2,5Miliar
3. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memiliki kekayaan bersih Rp500juta sampai dengan Rp10M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp2,5Miliar sampai dengan Rp50Miliar.

Tidak dapat dipungkiri peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% setara dengan nilai Rp8.573,89T. Selain dampaknya terhadap perekonomian, kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja perlu mendapatkan dukungan, apalagi pada masa pandemi Covid 19. Dimana banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress dan terpaksa harus melakukan layoff terhadap karyawannya. Peranan yang sedemikian penting dari UMKM perlu mendapatkan dukungan baik dari Pemerintah, BUMN dan akademisi.

Sementara itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa sebanyak 3,79 juta UMKM sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Platform online seperti tokopedia, shoppee, bukalapak serta marketing digital channel instagram, facebook sangat penting dalam mendukung UMKM untuk melakukan perluasan daerah pemasaran. Sedangkan aplikasi digital misalnya aplikasi kasir juga sudah banyak tersedia di pasar seperti IKAS, Qasir, Kasir Pintar, Mesin Kasir dan sebagainya. Aplikasi tersebut dapat dengan mudah di download di GStore, bahkan sebagian besar tidak berbayar langganan bulanan. Namun aplikasi yang mengintegrasikan fungsi perusahaan penting terkait dengan masalah keuangan yang terjangkau oleh UMKM masih belum banyak tersedia. Bahkan pengetahuan UMKM tentang Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan Standar UMKM versi IAI belum banyak dipahami. Selain itu ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk memproses transaksi secara tepat dan akurat belum memadai. Padahal laporan keuangan sangat diperlukan oleh UMKM untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kewajibannya dalam bentuk perpajakan.

Kinarya Kitchen Store (KKS) adalah sebuah UMKM perusahaan dagang yang berbentuk Commanditer Venostchaap (CV) dan mempunyai strategi bisnis yang lain daripada UMKM perusahaan dagang lainnya. Perusahaan berdiri pada bulan Maret 2020. Adapun strategi yang diambil adalah sebagai pemasok atau supplier dari hotel resto kafe (Horeka) serta UMKM lainnya. Perusahaan melihat ceruk pasar yang belum terlayani, dimana kebutuhan Horeka terhadap supply bahan-bahan harus tepat waktu disamping itu mereka harus mempunyai target masalah efisiensi salah satunya dari unsur harga bahan baku. Sebagai perusahaan yang baru dan terkena dampak dari pandemi Covid 19 KKS tetap berusaha untuk bertahan dan berkembang, namun perusahaan belum mampu untuk membeli sistem aplikasi akuntansi yang terintegrasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada analisis situasi saat ini di KKS, maka pelaksana PKM merumuskan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di KKS sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam kondisi sedang berkembang dan membutuhkan sistem pendukung transaksi keuangan yang terintegrasi sehingga dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi UMKM atau Standar Akuntansi ETAP.
2. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, KKS belum mampu untuk membeli sistem yang terintegrasi untuk memproses transaksi keuangan dan menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi UMKM (ETAP)
3. Perusahaan belum mempunyai sumberdaya manusia dengan pengetahuan yang memadai tentang pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi UMKM (ETAP)

BAB II

PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei sampai dengan Juli 2022. Stock Opname dilakukan per tanggal 31 Juni 2022. Pelaksanaan stock opname dibantu oleh mahasiswa yang sedang magang pada KJA Dr. Endah Sri Wahyuni, CA. Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Kami mengamati aktivitas operasional mulai pembelian barang, pencatatan, pengikhtisaran dan penyusunan Laporan Keuangan menurut versi Perusahaan.

b. Wawancara

Kami melakukan wawancara untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang strategi, pengembangan usaha, keterbatasan dana dan keinginan menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi sehingga dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang performance usaha untuk mendapatkan investor atau kreditur.

c. Pengembangan format sistem pencatatan transaksi

Selanjutnya adalah mengembangkan format-format pencatatan yang diperlukan untuk mencatat transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan

d. Edukasi atau sosialisasi

Memberikan edukasi dan pembelajaran kepada SDM terkait terhadap format dan sistem pencatatan yang baru.

BAB III OUTPUT

Hasil dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijabarkan disini adalah yang berhubungan dengan rekening-rekening yang diprediksi dimiliki oleh Mitra.

Akun: Aset dan Liabilitas Keuangan

SAK EMKM	Kebijakan Akuntansi Mitra
Aset Keuangan dapat berupa:	Aset Keuangan Mitra terdiri dari:
a) Kas	a) Kas dan Setara Kas
b) Instrumen Ekuitas entitas lain	b) Piutang Usaha; adalah penjualan tempo kepada pembeli
c) Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan dari entitas lain.	c) Menggunakan Imprest fund system
Liabilitas keuangan adalah liabilitas yang berpakewajiban kontraktual untuk	Liabilitas Keuangan Mitra: a) Utang Usaha; adalah utang usaha kepada distributor
Pengakuan dan Pengukuran	Pengakuan dan Pengukuran
<ul style="list-style-type: none">▪ Aset dan liabilitas keuangan diukur berdasarkan harga perolehannya▪ Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Contoh untuk pinjaman, harga transaksinya adalah sebesar jumlah pinjaman. Piutang atau Utang harga transaksinya adalah sebesar jumlah tagihan.▪ Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangan pada:<ul style="list-style-type: none">- Harga transaksi- Dikurangkan dengan seluruh	<ul style="list-style-type: none">▪ Aset dan liabilitas keuangan diukur berdasarkan harga perolehannya▪ Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangan pada:<ul style="list-style-type: none">- Dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut

pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut

Akun: Persediaan

SAK EMKM	Kebijakan Akuntansi Mitra
<p>Persediaan adalah aset:</p> <p>d) Untuk dijual dalam keadaan normal</p> <p>e) Dalam proses produksi untk kemudian dijual; atau</p> <p>f) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa</p> <p>Pengakuan dan Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya ▪ Pengukuran menggunakan biaya standar atau metode eceran ▪ Menggunakan teknik pengukuran biaya persediaan yaitu masuk pertama keluar pertama (MPKP/FIFO) atau Rata-raya Tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan ▪ Penurunan nilai atau kerugian diakui sebagai beban periode dimana terjadinya penurunan atau kerugian 	<p>Persediaan Mitra adalah persediaan barang dagangan diantaranya adalah berbagai produk aninomoto, minyak goreng, susu UHT, fresh milk dan lain-lain</p> <p>Kebijakan akuntansi yang diambil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitra mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehan ▪ Menggunakan teknik pengukuran MPKP/FIFO ▪ Mengakui penurunan atau kerugian sebagai beban pada saat terjadinya

Akun: Aset Tetap

SAK EMKM

Kebijakan Akuntansi Mitra

Aset Tetap adalah aset yang:

Mitra mengambil kebijakan penyusutan

a) Dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usaha

Garis Lurus tanpa Nilai Residu

b) Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode

- Aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya.
- Jika aset tetap diperoleh dengan pertukaran, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah yang tercatat aset yang diserahkan.
- Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai beban dalam periode terjadinya
- Penyusutan menggunakan metode Garis Lurus atau metode Saldo Menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat: aset dilepaskan atau karena tidak ada manfaat ekonomik dimasa yang akan datang.

2. CHART OF ACCOUNT

Chart of Account yang dikembangkan adalah untuk mengantisipasi pencatatan transaksi yang sampai saat ini dilakukan oleh Mitra. Chart of Account di bagi

menjadi 2, yaitu COA untuk akun-akun untuk Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan COA untuk akun-akun Laba Rugi. COA lengkap ada di lampiran 2.

3. Format Pencatatan Persediaan

Karena sebelumnya mitra belum mencatat persediaannya, maka dilakukan stock opname untuk mencatat mutasi persediaan penjualan.

STOCK CARD

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Saldo		
	Q	P	Σ	Q	P	Σ	Q	P	Σ
1/7/2022							14	Rp XXX.060	RpX.XXX.840
1/7/2022							5	Rp XX.755	Rp XXX.775
1/7/2022									Rp X.XXX.615

4. Format Laporan Keuangan

Format Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut

Total sales	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Sales							
Harga Pokok							
Laba Kotor							
Biaya Operasional							
Gaji							
Penyusutan							
Sewa							
BPJS							
Listrik, Air, Wifi							
Bensin							
Total Beban Operasional							
Laba Rugi Bersih							

Format Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan Posisi Keuangan per 31 Juli 2022			
Aset Lancar		Utang Lancar	-
Kas			
BCA			
Piutang			
Persediaan		Utang Jangka Panjang	-
Jumlah Aset Lancar		Total Utang	-
Aset Tetap			
Kendaraan		Ekuitas	
Jumlah Aset Tetap		Awal	
		Tambah Modal Disetor	
		Laba 2020	
Total Aset		Total Utang dan Ekuitas	

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha menetapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BKPM.go.id

Standar Akuntansi Keuangan EMKM, IAI

LAMPIRAN 1
RINCIAN ANGGARAN BIAYA

No	Uraian	Unit	Jumlah	Biaya	Jumlah
1	BAHAN HABIS PAKAI				
	Administrasi dan Akomodasi				
	Penggandaan dan Jilid Proposal (5 rangkap)	Rangkap	5	Rp 30.000	Rp 150.000
	Penggandaan dan Softcover Laporan (5 rangkap)	Rangkap	5	Rp. 40.000	Rp 200.000
	Perlengkapan (Flashdisk, Map, Atk)				Rp 180.000
	Makanan dan Minuman dan Makan Siang untuk Rapat Intern Tim Abdimas dengan Tim Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Sari				Rp 750.000
	Sub Total				Rp 1.280.000
2	OPERASIONAL				
	Transportasi dan Komunikasi				
	Transportasi Dosen	3 Orang/hari (Kunjungan dan Rapat)	2	Rp 100.000	Rp 600,000
	Komunikasi	3 orang		Rp 70.000	Rp 210.000
	Sub Total				Rp 810,000
	Total Biaya				Rp 2.090.000

Lampiran 2:

Chart of Account

Account#	Account Name
COA Balance Sheet	
1	Aset
1,01	Aset Lancar
1.01.01	Kas dan Setara Kas
1.01.01.01	Kas Kecil
1.01.01.01.01	Kas Kecil (IDR)
1.01.01.02	Bank
1.01.01.02.01	Bank (IDR)
1.01.01.02.01.01	Bank (IDR) - Bank A
1.01.02	Piutang
1.01.02.01.01.00001	Trade Receivables - Invoiced Customer X
1.01.02.01.01.00002	Trade Receivables - Invoiced Customer Y
1.01.02.02	Piutang Lainnya
1.01.02.03	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha
1.01.03	Persediaan
1.01.03.01	Persediaan - XX1
1.01.03.02	Persediaan - XX2
1.01.03.03	Persediaan - XX3
1.01.03.04	Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan - XX1
1.01.03.05	Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan - XX2
1.01.03.06	Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan - XX3
1.01.04	Uang Muka Vendor
1.01.04.01.00002	Advances to Supplies - Vendor A
1.01.04.01.00003	Advances to Supplies – Vendor B
1.01.05	Biaya Dibayar Dimuka
1.01.05.02	Sewa Dibayar Dimuka
1.01.05.03	Biaya Dibayar Dimuka Lainnya
1.01.06	Pajak Dibayar Dimuka
1.01.06.01	Pajak Dibayar Dimuka - PPH 21
1.01.06.04	Pajak Dibayar Dimuka - PPH 25
1.01.06.05	Pajak Dibayar Dimuka - PPH 4 (2)
1.01.06.09	Pajak Dibayar Dimuka - PPN 11%
1.01.07	Piutang Pinjaman - Bagian Lancar
1.01.07.01	Piutang Pinjaman - Bagian Lancar - Pihak Yang Bersangkutan
1.01.08	Aset Lancar Lainnya
1,02	Aset Tidak Lancar
1.02.01	Aset Tetap
1.02.01.01	Aset Tetap - Tanah
1.02.01.02	Aset Tetap - Bangunan
1.02.01.03	Aset Tetap - Kendaraan
1.02.01.06	Aset Tetap - Akumulasi Depresiasi - Gedung

1.02.01.07	Aset Tetap - Akumulasi Depresiasi - Kendaraan
1.02.01.09	Aset Tetap - Akumulasi Depresiasi - Peralatan Kantor
1.02.06	Piutang Pinjaman - Bagian Jangka Panjang
1.02.06.01	Piutang Pinjaman - Bagian Jangka Panjang - Pihak Ketiga
1.02.07	Aset Tidak Lancar Lainnya
1.02.07.04	Aset Tidak Lancar Lainnya - Lainnya
	2 Liabilitas
	2,01 Liabilitas Lancar
2.01.01	Utang Usaha & Lainnya
2.01.01.01	Utang Usaha
2.01.01.01.01	Utang Usaha - Pihak yang Bersangkutan - Invoiced
2.01.01.01.01.00002	Trade Payable - Related Parties - Invoiced Vendor B
2.01.01.01.01.00003	Trade Payable - Related Parties - Invoiced Vendor A2
2.01.01.01.02	Utang Usaha - Pihak yang Bersangkutan - Uninvoiced
2.01.01.01.02.00002	Trade Payable - Related Parties - Uninvoiced Vendor B
2.01.01.01.02.00003	Trade Payable - Related Parties - Uninvoiced Vendor A2
2.01.01.02	Utang Lainnya
2.01.02	Biaya yang Masih Harus Dibayar
2.01.02.01	Biaya yang Masih Harus Dibayar - Operasional
2.01.02.02	Biaya yang Masih Harus Dibayar - Gaji
2.01.02.03	Biaya yang Masih Harus Dibayar - Tunjangan & Bonus
2.01.03	Utang Pajak
2.01.03.01	Utang Pajak - PPH 21
2.01.03.02	Utang Pajak - PPH 22
2.01.03.03	Utang Pajak - PPH 23
2.01.03.04	Utang Pajak - PPH 25
2.01.03.05	Utang Pajak - PPH 4 (2)
2.01.03.06	Utang Pajak - PPN 1%
2.01.03.07	Utang Pajak - PPN 10%
2.01.03.08	Utang Pajak - PPN WAPU
2.01.03.09	Utang Pajak - PPN 11%
2.01.04	Uang Muka Customer
2.01.04.01	Uang Muka Customer - Pihak yang Bersangkutan
2.01.04.01.00001	Advance Received from Customers Customer X
2.01.04.01.00002	Advance Received from Customers Customer Y
2.01.05	Utang Bank Jangka Pendek
2.01.05.01	Utang Bank Jangka Pendek (IDR)
2.01.05.01.01	Utang Bank Jangka Pendek - Bank A
2.01.06	Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Lancar
2.01.06.01	Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Lancar (IDR)
2.01.06.01.01	Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Lancar (IDR) - Bank A
2.01.07	Liabilitas Sewa - Bagian Lancar
2.01.07.01	Liabilitas Sewa - Bagian Lancar - Tanah
2.01.07.02	Liabilitas Sewa - Bagian Lancar - Gedung
2.01.07.03	Liabilitas Sewa - Bagian Lancar - Kendaraan
2.01.07.04	Liabilitas Sewa - Bagian Lancar - Peralatan

- 2.01.08 Utang Imbalan Kerja Karyawan - Bagian Lancar
- 2.01.09 Utang Jangka Pendek Lainnya

COA Laporan Laba Rugi

- 4 Pendapatan
 - 4,01 Pendapatan Penjualan XX1
 - 4,02 Pendapatan Penjualan XX2
 - 4,03 Pendapatan Penjualan XX3
- 5 Beban Pokok Pendapatan
 - 5,01 Beban Pokok Pendapatan - Penjualan XX1
- 6 Beban Penjualan
 - 6,01 Beban Penjualan - Biaya Pengiriman
 - 6,06 Beban Penjualan - Beban Gaji
 - 6.06.01 Beban Penjualan - Beban Gaji - Gaji
 - 6.06.09 Beban Penjualan - Beban Gaji - Tunjangan PPH 21
 - 6.06.10 Beban Penjualan - Beban Gaji - BPJS TK (JHT)
 - 6,08 Beban Penjualan - Lainnya
- 7 Beban Umum dan Administrasi
 - 7,01 Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji
 - 7.01.01 Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji - Gaji
 - 7.01.05 Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji - Insentif
 - 7.01.06 Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji - Tunjangan Perayaan Keagamaan
 - 7.01.10 Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji - BPJS TK (JHT)
 - 7.02.02 Beban Umum dan Administrasi - Beban Depresiasi - Kendaraan
- 8 Pendapatan Lain-lain
- 9 Beban Lain-lain
 - 9,01 Beban Lain-lain - Beban Pajak
 - 9,07 Beban Lain-lain - Lainnya

Lampiran 3
Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Stock Opname





Kegiatan Stock Opname

